

# PERTARUNGAN KEPENTINGAN DI RUANG PUBLIK

Albertus Heriyanto

**Abstract:** Since 2004 the female native merchants of Papua have striven to gain a place for marketing in the center of Jayapura city. These women try to prove that they have abilities to contribute to their household income; but they realize the complexity of free market competition. Therefore, they need local government's protection. Moreover, these female native merchants need support and empowerment in order to get involved into the competition of modern marketing system. On the other hand, the city people need a traditional market within their daily activities. The problem of native female merchants in Jayapura city drives us to the understanding that as citizens they need our concern. Their existence has to be estimated by the city planning department.

Besides that, the citizens need the representative public space where they can express their creativity and actualize themselves in a close social relationship with friends and relatives. The dynamics of urban life require a good planning system in which all urban needs could be managed: the needs of economic transaction, social interaction, transportation, and recreation. Without a long-term planning in structuring the city and consideration to the real today's situation, what would be happened is the inter-society conflict in grabbing space that brings about the degradation of environmental quality which means the degradation of well-being of life, as well. Therefore, urban planning for space has to be constructed for the sake of multiple interests, both in social economic and cultural development.

**Key Words:** pasar • ruang publik • kota • mama-mama Papua • pedagang kaki lima •

**B**ila Anda berjalan-jalan ke Kota Jayapura pada malam hari, mungkin Anda akan berjumpa dengan sekelompok mama-mama yang berjalan di sebuah lapangan parkir di tengah kota. Di sana sejumlah mama-mama asli Papua menggelar aneka sayuran, buah, ubi-ubian, dan kebutuhan masak-memasak lainnya. Mereka mengadu peruntungannya di tengah keramaian kota. Pemandangan yang kurang lebih sama namun dalam skala yang jauh lebih kecil, dapat kita jumpai juga di sepanjang trotoar depan kampus Universitas Cenderawasih Abepura, dan di satu wilayah pemukiman yang sering disebut Kotaraja Dalam.



Kehadiran para mama yang menghadirkan pasar tradisional di tengah kota itu di satu pihak memang sangat membantu keluarga-keluarga yang sepanjang hari sibuk dan tak sempat ke pasar untuk berbelanja. Namun di lain pihak, keberadaan mereka memunculkan masalah. Mereka merampas hak para pejalan kaki untuk berjalan nyaman di trotoar dan hak para pengendara untuk memarkir kendaraannya. Keberadaan pasar tersebut -oleh sebagian orang- dipandang merusak keindahan kota dan menimbulkan konflik tata guna ruang publik. Namun, di balik itu, hal yang tak kalah penting untuk dicermati ialah bagaimana –dalam pertarungan antar-kepentingan yang berbeda– para mama Papua itu berjuang demi kelangsungan hidup keluarganya, di tengah hiruk-pikuk persaingan masyarakat kota.

### **Pasar Tradisional di Belantara Pasar Modern**

Pasar mama-mama Papua dapat kita jumpai saat senja mulai menjelang, di jantung kota Jayapura. Pasar ini menempati lahan kurang lebih 20 x 40 m<sup>2</sup> di tengah belantara pasar modern. Pada siang hari lahan ini adalah tempat parkir mobil, namun pada malam hari -terpaksa- dialihfungsikan menjadi pasar tradisional.

Sisi utara pasar mama-mama Papua tersebut berbatasan dengan Jalan Percetakan Negara, yang di seberangnya berdiri megah Hotel Yasmin yang berlabel bintang tiga. Di deretan ini terletak pula Hotel Dafonsoro yang sekelas bintang dua, Toko Pasifik, Dealer Honda, Konsulat Papua New Guinea, dan toko-toko lainnya. Berbelok sedikit ke utara, ada Bank Indonesia. Di sisi lain jalan ini ada Kantor Imigrasi dan bekas Kantor Departemen Penerangan.

Di sisi timur, tepat berdampingan dengan pasar tradisional ini berderet warung-warung makan kecil yang menjual bakso, mie goreng/rebus, coto Makasar, ikan bakar, dan sebagainya. Di belakang deretan warung ini, menghadap ke sisi jalan yang lain, berdiri megah Toko Buku Gramedia dan Panin Bank.

Di sisi selatan ada sebuah jalan kecil yang sering berfungsi sebagai tempat parkir sepeda motor. Di Seberang jalan kecil itu berdiri megah sebuah gedung berlantai dua. Lantai dasar gedung ini berfungsi sebagai Supermarket Gelael, sedang lantai atasnya menyala terang sebuah papan nama yang menandai bahwa di situ tersaji hidangan waralaba Kentucky Fried Chicken. Di sebelah Gelael, ada sebuah hotel kecil kelas melati. Di selatan Gelael masih ada beberapa toko lain, dan 100 meter berikutnya ada



sebidang ruang publik, Taman Imbi, yang menjadi tempat duduk-duduk santai masyarakat Jayapura. Taman terbuka seluas kurang lebih separuh lapangan sepakbola ini sepanjang hari selalu ramai, dan menjadi sangat ramai pada malam Minggu. Dari sisi selatan Taman Imbi ke arah barat sepanjang sekitar 1 kilometer, melintang Jalan Ahmad Yani yang boleh dikatakan menjadi jantung kota dan representasi denyut nadi perekonomian kota Jayapura. Di sana antara lain berdiri megah gedung Bank Papua yang berlantai 5, Polres Kota Jayapura, gedung Keuangan Negara Provinsi Papua, Hotel Matoa, deretan pertokoan dan dua buah *supermarket*, yakni Sagu Indah Plaza dan Saga Mall.

Di sisi barat melintang jalan Irian di mana sepanjang kurang lebih 300-400 meter berderet pertokoan, baik toko emas, meubel, barang elektronik, kain dan pakaian, sebuah *mini-market*, dan toko alat olahraga. Di sela toko-toko itu terdapat juga gedung kesenian, yang sayangnya tidak banyak menggemakan geliat dunia seni Papua. Deretan pertokoan ini pada malam hari diramaikan pula oleh pedagang-pedagang kakilima yang memenuhi trotoar dan teras toko.

Pada siang hari wilayah yang digambarkan di atas, sekilas lumayan rapi. Tak ada kakilima, apalagi pasar. Pusat kota dan Jalan Irian khususnya, di siang hari adalah wajah Jayapura sebagai kota modern, di mana terbuka deretan kantor-kantor pemerintah, toko, bank, dan hotel. Di depannya, berderet mobil serta sepeda motor yang parkir di tepi jalan. Sayangnya deretan simbol-simbol modernitas tersebut sedikit terganggu dengan wajah trotoar yang rusak dan kotor di sana-sini. Paving-paving blok beberapa di antaranya mulai lepas, dan pot-pot bunga yang sudah kehilangan daun dan bunganya. Satu hal lagi yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman ialah banyaknya semprotan ludah-ludah pinang yang mempercak di sana-sini, baik di trotoar, tepi jalan, hingga ke dinding-dinding pertokoan.

Menjelang matahari terbenam di ufuk barat, geliat kehidupan malam mulai tampil mengubah suasana kota yang teratur rapi tersebut. Pedagang-pedagang pakaian, alas kaki, permainan anak, asesoris, topi, hingga penjual obat mulai menggelar dagangannya di trotoar depan pertokoan. Yang tak kalah menarik ialah hadirnya pasar tradisional oleh mama-mama yang kebanyakan asli Papua, yang menggelar dagangannya di aspal, beralaskan lembaran karung plastik atau potongan terpal atau kardus di lapangan parkir, diapit dan dikelilingi oleh gemerlap hotel, toko, *super-market*, KFC, dan deretan kendaraan yang terparkir. Mama-mama Papua itu menjual berbagai macam sayuran dan bumbu, seperti kangkung, sawi, bayam, daun singkong, labu siam, tomat, rica, bawang, daun bawang, dan sebagainya.



Selain itu ada juga ubi-ubian khas seperti singkong (*kasbi*), ubi jalar (*petatas*), dan keladi. Yang tentunya juga sangat khas ialah ada juga sirih dan pinang. Singkatnya, apa yang biasanya ada di pasar pagi,<sup>1</sup> ada pula di pasar tradisional malam ini. Inilah wajah lain kota Jayapura, di malam hari.

Kehadiran pasar tradisional di tengah gemerlap kota ini mulai berlangsung sejak sekitar 2003-2004. Sebelumnya mereka menyebar di berbagai tempat di trotoar-trotoar di tengah kota, terutama di Jalan Ampera, yang kemudian meluap hingga ke Jalan Ahmad Yani. Setelah berkali-kali terusir ke sana ke mari, melalui proses negosiasi dengan pemerintah kota, akhirnya pada tahun 2004 mereka diizinkan untuk menggelar dagangannya di lahan parkir di tengah kota.

Apa yang tergambar di atas bukanlah satu-satunya fenomena pasar malam di kota Jayapura. Di tepi Jalan Raya Sentani, tepat di depan terminal sementara angkutan kota (depan Museum Daerah Provinsi Papua), kita bisa menemukan pemandangan yang hampir sama, namun dalam skala yang lebih kecil. Demikian pula halnya di trotoar depan kampus Universitas Cenderawasih Abepura. Di daerah Cigombong, Kotaraja, tergelar juga pasar malam serupa. Bedanya, para ibu yang berjualan di pasar Cigombong sudah bercampur antara mama-mama asli Papua dan kaum pendatang. Mereka pun tidak menggelar dagangannya di tanah atau di lantai, melainkan di meja-meja kayu. Beberapa di antaranya malah dilengkapi dengan tenda, untuk melindungi diri dan dagangannya dari hujan.

### **Duduk di Lantai, Dagangan Tergelar di Lembaran Karung Plastik**

Masalah yang menarik dikaji ialah, mengapa para mama Papua ini menggelar dagangannya di tanah/lantai dengan hanya menggelar lembaran karung plastik, kardus, atau potongan terpal. Jarang di antara mereka yang mengupayakan meja kayu sebagaimana dibuat oleh ibu-ibu dari daerah lain. Ciri ini tidak hanya terlihat di pasar-pasar dadakan yang mengambil tempat lahan parkir atau pun di trotoar tersebut, tapi tampak juga bila kita masuk ke pasar Sentral Hamadi atau pun Pasar Youtefa Abepura. Para mama Papua ini umumnya berjualan di tepi jalan dalam pasar, walau tersedia tempat di los-los buatan pemerintah. Bagi para mama yang berjualan di Pasar Youtefa,

---

<sup>1</sup>Di Kota Jayapura ada dua pasar resmi yang buka sejak pagi hingga sore hari, yakni Pasar Sentral Hamadi dan pasar Youtefa Abepura. Namun, selain itu ada pula pasar-pasar tak resmi, seperti di Jl. Ampera (jalan masuk bekas pasar Ampera) dan pasar ikan Dok IX, serta beberapa tempat lain yang skalanya lebih kecil.



alasan utama mereka tidak berjualan di los-los yang sudah dilengkapi meja yang terbuat dari semen itu ialah karena di los-los tersebut sepi pembeli dan ongkos sewanya mahal, padahal dagangan yang mereka bawa terkadang hanya beberapa ikat kangkung yang keuntungannya tidak sepadan dengan harga sewa meja di los-los resmi. Selain itu, meja yang terletak di posisi strategis sudah dikuasai oleh pedagang dari daerah lain.

Dengan meminjam pemikiran de Certeau (1984) fenomena ini kiranya bisa dilihat sebagai taktik perlawanan mereka terhadap para pedagang lain yang bermodal lebih besar, yang bisa menyewa los-los permanen dan menggelar dagangannya secara menarik dan rutin setiap hari. Strategi mereka menghadapi situasi yang kurang menguntungkan itu ialah dengan 'mencegat' pembeli di tepi jalan. Dengan cara ini kadangkala pembeli bahkan tidak perlu turun dari sepeda motornya untuk membeli seikat kangkung atau sayuran lain yang mereka jual. Pembeli cukup menanyakan harga, menunjuk ikatan kangkung yang dikehendaki, membayarnya, maka kangkung pun akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan segera berpindah tangan. Akibat strategi 'mencegat pembeli di pinggir jalan' tersebut, di Pasar Youtefa banyak meja di los-los resmi justru kosong, sementara di tepi jalan, para penjual berjajar hingga memenuhi sebagian badan jalan. Ironisnya, los-los resmi yang kosong tersebut sering malah menjadi tempat bagi kaum lelaki untuk berjudi (bermain kartu), bukan menjadi tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan sebagaimana layaknya los pasar.

Selain itu, mama-mama Papua tersebut juga merasa tidak perlu repot membuat meja, dan setiap kali harus juga memasang dan mengemasinya. Mereka bukanlah pedagang yang setiap hari dan sepanjang hari rutin berjualan, sehingga tidak setiap hari pula mereka membutuhkan meja untuk berjualan. Jumlah dagangan yang mereka bawa tidaklah banyak sehingga seringkali tidak butuh waktu lama untuk menunggu habisnya dagangan.

Faktor lain yang kiranya perlu dicatat juga ialah faktor budaya. Secara budaya, duduk di tanah bukanlah suatu beban bagi para mama Papua. Mereka sudah terbiasa duduk di tanah, sehingga merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Di dalam rumah-rumah mereka, maupun dalam acara-acara bersama di kampung halaman pun mereka terbiasa duduk di tanah. Pemandangan yang serupa tampak pula di Pasar Sinagma, Wamena. Meja-meja pasar umumnya dikuasai oleh kaum pendatang, sementara warga asli justru 'melantai'.

Masalahnya, apakah dengan alasan sudah biasa maka tidak ada kecemburuan sosial terhadap rekan pedagang lain yang bisa menempati



meja di los-los resmi yang telah disiapkan itu? Ternyata bukan demikian. Ketidakberdayaan untuk masuk dalam persaingan pasar itu pada gilirannya melahirkan kecemburuan yang berujung pada demonstrasi sekitar 200 mama-mama Papua itu di depan kantor Walikota Jayapura. Sebagaimana dilaporkan Suara Pembaruan, 13 Oktober 2008, mereka meneriakan tuntutan mereka, "Berikan Otsus buat kami, MR Kambu mana janjimu, kami mama-mama asli Papua butuh pasar yang layak, Otsus nihil." Mereka meneriakan tuntutan itu sambil membentangkan berbagai pamflet dan spanduk yang intinya minta perhatian pemerintah agar dibangun pasar tradisonal untuk mereka.

Mama-mama, pedagang asli Papua itu menuntut agar pemerintah kota membangun pasar khusus bagi mereka. Aksi mereka ini antara lain didukung SKP Keuskupan Jayapura, Biro Keadilan dan Perdamaian Sinode Kingmi Papua, Bidang KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan LP3A Papua. Tuntutan pembangunan pasar khusus bagi mama-mama asli Papua di tengah Kota Jayapura ini sebenarnya diharapkan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2009. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan definitif yang dibuat pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Di hadapan Wali Kota Jayapura, Koordinator Unit Penguatan Basis SKP Keuskupan Jayapura mengatakan bahwa perjuangan mama-mama Papua untuk mendapatkan pasar khusus yang permanen, layak, dan manusiawi di tengah kota telah berlangsung tiga tahun, namun tuntutan itu belum juga dipenuhi. Ia mengatakan:

"Meskipun begitu, hingga kini perhatian terhadap mama-mama pedagang tersebut belum sepenuhnya ditunjukkan pemerintah setempat. Pasalnya, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, mereka bertahan berjualan dalam kondisi yang memilukan, seperti berjualan di atas pasar dan pinggir jalan," ujarnya disambut tepuk tangan mama-mama Papua ini (Suara Pembaruan, 13 Oktober 2008)."

Dalam unjuk rasa tersebut terungkap bahwa sejak mama-mama pedagang kakilima ini digusur awal Februari 2005, mereka terus berjuang meminta pasar yang layak buat mereka, namun masih belum juga ada tanda-tanda realisasinya. Maka, pada kesempatan unjuk rasa tersebut para mama asli Papua menagih janji sang walikota. Suara Pembaruan (13 Oktober 2008) melaporkan pula, salah satu mama penjual sayur dengan lantang mengungkapkan kekesalannya. "Pak wali kota, saya tagih janjinya. Saya tak perlu bicara banyak, karena tahun 2003 lalu, saya ingat sekali kata-kata bapak untuk membangun pasar ini," katanya.



Mereka terus mendesak pemerintah daerah untuk segera menerima dan mewujudkan usulan pembangunan pasar permanen di tengah kota. Dalam penjelasannya mereka mengatakan bahwa mama-mama tersebut sampai saat itu masih saja berjualan dalam kondisi yang amat memprihatinkan, yang oleh Suara Pembaruan (13 Oktober 2008), diungkapkan dengan kata “memilukan”. Dalam demonstrasi tersebut mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.

“*Pertama*, meminta dianggarkan dana untuk pasar khusus di tengah Kota Jayapura bagi mama-mama di dalam APBD 2009. *Kedua*, lokasi pembangunan pasar yang dipilih, adalah lokasi berdirinya gudang bekas milik PD Irian Bhakti di Jalan Percetakan Jayapura. *Ketiga*, pemerintah daerah agar membuat program khusus bantuan modal dan pembinaan yang berkelanjutan bagi mama-mama Papua dalam meningkatkan kapasitas mereka sebagai pedagang yang profesional. *Keempat*, desakan ini akan terus dilayangkan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan tuntutan mama-mama ini agar cita-cita besar otonomi khusus (Otsus) Papua untuk meningkatkan taraf hidup orang asli Papua dan menjadikan mereka sebagai tuan di negeri sendiri dapat terwujud.”

Walikota Jayapura saat itu, tidak dapat menjawab dengan tegas permintaan tersebut, dan secara politis meminta kepada para pengunjung rasa agar diberi waktu untuk kembali mempelajari masalah ini (Suara Pembaruan, 13 Oktober 2008).

Tuntutan mereka untuk memperoleh pasar khusus tersebut di satu pihak kiranya dapat dibaca sebagai cermin dari rasa terpinggirkan, terutama bila kita melihat kenyataan bahwa di pasar-pasar tradisional konvensional yang ada, di mana semua pedagang memiliki akses yang relatif sama untuk bersaing di dalamnya, mama-mama Papua ini kenyataannya memang terpinggirkan. Mereka belum mampu bersaing dengan pedagang dari kelompok sukubangsa lain yang sudah lebih dulu bergelut dalam dunia perdagangan dan dengan demikian juga lebih terampil dalam mengelola barang, modal, serta menjalin relasi dengan petani dan pedagang lain sebagai pemasok barang dagangan, maupun melayani pembeli. Pengalaman yang panjang membuat para pedagang pendatang lebih tahu taktik dan strategi untuk menarik perhatian pembeli serta merebut tempat-tempat strategis.

Para pendatang lebih piawai dalam mengelola modal, menjadikannya sebagai modal berikut untuk meraih sesuatu yang lebih, dan mentransformasikan keuntungan hari ini sebagai modal untuk hari esok. Pola berpikir dan disposisi mental seperti inilah yang kiranya belum dimiliki



oleh kebanyakan pedagang pribumi dan mama-mama Papua. Kondisi tersebut kiranya dapat dimengerti, karena secara tradisional suku-suku bangsa di Papua adalah kaum pemburu-peramu atau pun petani ladang-berpindah (bdk. Boelaars, 1986). Dalam tradisi budaya tersebut, apa yang diperoleh hari ini biasanya dihabiskan pula untuk hari ini (*here and now*). Kalau pun ada kelebihan yang disimpan atau pun dipertukarkan, itu bukan dimaksudkan sebagai modal yang akan ditransformasikan menjadi semata-mata keuntungan ekonomis, melainkan dalam kerangka resiprositas. Proses pertukaran tradisional tersebut selain bernuansa ekonomis, juga bertujuan menjalin ikatan sosial antarwarga. Pengalaman berdagang dalam kerangka ekonomi pasar, pertukaran ekonomis berbasis uang, merupakan sesuatu yang baru,<sup>2</sup> yang berkembang seiring makin membanjirnya arus pendatang dari daerah-daerah lain. Namun, keterlibatan yang serta-merta dalam tata ekonomi baru ini, sebagaimana tergambar dalam uraian di atas, tidak segera berbuah manis. Perilaku ekonomi tradisional sebagai pemburu-peramu itu masih mempengaruhi perilaku ekonomi mereka ketika memasuki dunia modern. Mereka menghabiskan apa yang mereka dapat hari ini, karena esok akan ada rejeki lainnya, akan ada sesuatu yang bisa dimakan.

Tata sosial ekonomi di perkotaan yang berbeda dari tata ekonomi tradisional ini mengantar banyak orang Papua ke ruang kehidupan yang ambigu. Di satu pihak mereka tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas ekonominya secara tradisional (berburu, berkebun, beternak babi) karena di Kota Jayapura mereka tidak memiliki hak atas tanah (hak ulayat), sementara untuk membeli atau menyewa, mereka tidak memiliki cukup modal. Sementara dengan wawasan tentang prinsip-prinsip kehidupan ekonomi modern yang terbatas, pemikiran untuk menyimpan, menabung, dan menjadikan sedikit keuntungan yang diperoleh sebagai modal untuk keuntungan berikutnya yang lebih besar belum sepenuhnya tertanam dalam benak. Semua ini membuat banyak di antara mereka sulit berkembang dalam hal perekonomian dan dalam persaingan pasar menjadi pihak yang terpinggir. Di lain pihak, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk hidup dalam dinamika

---

<sup>2</sup>Papua baru menjadi wilayah Indonesia sejak 1963, dan bagi banyak masyarakat tradisional di berbagai tempat di Indonesia, butuh banyak waktu untuk sungguh beralih pada interaksi dagang dalam tata ekonomi uang (bukan barter). Mama-mama pedagang pasar malam tradisional itu sebagian adalah mama-mama dari berbagai daerah di Papua yang anak-anaknya bersekolah atau pun kuliah di Jayapura, tapi ada juga yang ke Jayapura karena tertarik oleh ajakan teman, tetangga, kerabat yang sudah lebih dulu mengadu peruntungannya di kota Jayapura.



ekonomi modern yang berbasis pertukaran barang dan jasa, apalagi pengetahuan tentang dunia industri dan aspek-aspek kehidupan lain yang berbasis teknologi informasi.

Walau demikian, kenyataannya arus urbanisasi ke kota Jayapura cukup tinggi dan banyak orang bertahan hidup di kota tanpa bekal pengetahuan dan ketrampilan atau pun modal finansial yang sepadan dengan tuntutan kehidupan kota. Pertanyaannya, bagaimana mereka bertahan hidup di tengah kota dalam kondisi seperti itu? Theo van de Broek (1998: 47-48) mengatakan bahwa mereka bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas itu karena dalam masyarakat pribumi terdapat mekanisme sosial untuk menjamin hidup para anggotanya, termasuk yang kurang mampu. Dalam budaya tradisional mereka, nilai kesetiakawanan seolah sudah mendarah daging, dan nilai tersebut mereka praktikkan ketika ada kerabat, teman sekampung, atau kenalan yang mengalami kesulitan. Kesetiakawanan dan kemurahan hati sesama dalam satuan-satuan ikatan primordial itulah yang kemudian menjadi andalan banyak orang untuk menjalani hidup di perkotaan. Ketika mereka mengenal salah seorang kerabatnya tinggal di kota, mereka tidak segan-segan ke sana, walau tanpa bekal apa pun, karena mereka yakin bahwa sang kerabat tidak akan menolaknya. Menolak kehadiran seorang kerabat merupakan aib bagi relasi persaudaraan di antara mereka. Prinsip-prinsip hidup bersama semacam itu kemudian menjadi semacam “jaminan sosial” bagi para tuna karya.

Kenyataanlah yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa tanpa modal yang memadai, sulit untuk memainkan peran yang signifikan dalam dinamika kehidupan kota. Para mama Papua yang berdagang di tengah Kota Jayapura mengalami dan merasakan bahwa mereka hanya bisa mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi periferial, sementara yang ada di pusat aktivitas tersebut adalah para pejabat, pemilik toko dan *supermarket*, pemilik hotel, dan sebagainya. Rasa terpinggir akibat dominasi pemegang kuasa ekonomi modern dalam persaingan pasar itu mendorong mereka untuk menghadirkan ‘pasar baru’ di trotoar-trotoar, yang kemudian terakumulasi menjadi ‘pasar di lahan parkir’ yang selanjutnya memunculkan ide dan tuntutan untuk membuat pasar khusus di tengah kota. Masalahnya, apakah ide dan tuntutan ini baik? Apa yang akan terjadi bila ada pasar khusus untuk orang asli Papua?

Di satu segi boleh jadi baik, karena mereka dapat menjadi tuan dan nyonya di pasarnya sendiri. Pasar khusus ini bila dikelola dengan baik, dan para mama Papua tersebut dapat mewedahi diri dalam kelompok di mana mereka dapat belajar bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman



dalam mengelola barang dan modal, dalam menarik perhatian dan melayani pembeli, maka pasar tersebut dapat menjadi medan belajar bagi para mama Papua. Mungkin saja, bila mereka mampu mengelolanya, pasar ini akan menjadi satu daya tarik tersendiri, di mana kita bisa melihat bagaimana ciri budaya Papua tercermin dalam dinamika pasar yang khas. Namun bila tidak, maka mereka hanya akan terperjara dalam kenyamanan semu, dan kekhususan itu hanya akan menghadirkan 'keunikan' yang menarik bagi pariwisata tapi kurang bernilai dari sisi pembelajaran (dalam hal berdagang) bagi para mama Papua. Di segi lain mama-mama Papua akan masuk dalam eksklusivitas kelompok, tertutup dalam lingkungan sukubangsanya sendiri. Pertanyaannya, dalam situasi demikian bagaimana mereka akan belajar tentang dinamika riil masyarakat kota di mana interaksi antarbudaya adalah suatu keniscayaan?

Masalahnya, Pak Walikota sudah berjanji, dan sebagaimana tuntutan etisnya, janji harus ditepati. Kalau Pak Walikota sudah tahu bahwa tidak ada dana, atau tidak yakin bahwa akan tersedia dana untuk itu, kenapa dulu ia berani berjanji? Ataukah warga masyarakat memang begitu bodoh untuk terlalu mudah percaya pada janji-janji kampanye, padahal mereka semestinya menyadari bahwa janji saat kampanye tidak bisa begitu saja dipercaya? Apapun situasinya, baik juga bahwa tuntutan itu disuarakan, sebagai pembelajaran bagi para calon pejabat untuk tidak mudah mengobral janji.

### **Pasar Tradisional dan Kepedulian Kita**

Oleh para pemujanya, sistem ekonomi kapitalistik sering digambarkan sebagai sistem ekonomi yang paling merangsang orang untuk kreatif, terus berusaha, dan bekerja keras. Dengan demikian dinamika kehidupan ekonomi secara keseluruhan dan peradaban manusia pun sangat dirangsang untuk berkembang. Namun, nuansa persaingan yang keras dalam pasar bebas (sebagai konsekwensi praktis dari sistem ekonomi tersebut) pada gilirannya menjadi sistem ekonomi yang paling menindas kaum lemah. Mereka yang tidak memiliki banyak modal -baik modal finansial, modal pengetahuan dan ketrampilan, maupun jaringan relasi- akan mudah terpuruk dan terpinggirkan dari persaingan hidup yang semakin lama semakin keras. Maka, sistem ekonomi pasar (yang menjadi roh kapitalisme) kiranya hanya cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang secara relatif memiliki kemampuan setara untuk saling bersaing.

Adapun, kondisi sosial masyarakat di Papua, baik dari segi pendidikan, ketrampilan, modal finansial, maupun akses pasar, masih sangat



timpang.<sup>3</sup> Maka, kiranya cukup wajar bila sebagian masyarakat asli Papua (dalam hal ini para mama Papua di pasar tradisional) membutuhkan kebijakan yang berpihak pada mereka, bahkan bila perlu bersifat protektif. Mereka membutuhkan kondisi yang memungkinkan mereka belajar, mereka membutuhkan pendampingan untuk lebih terliterasi dan lebih terampil, agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya dalam pola-pola dagang modern. Bila mereka dibiarkan masuk dalam persaingan pasar bebas tanpa keberpihakan dan perlindungan, tanpa upaya pendampingan yang mencerahkan, maka proses mengejar ketertinggalan itu akan sangat lama, sebab boleh dikatakan bahwa secara budaya orang Papua melompat dari sistem ekonomi barter dalam tradisi berburu-meramu dan pertanian tradisional ke –sekaligus– sistem ekonomi uang dalam tradisi pertanian modern, industri, jasa, dengan kecanggihan teknologi informasi. Bila kita membiarkan mereka berusaha sendiri tanpa membantu sedikit pun, tanpa advokasi akan keterpinggiran mereka, itu sama artinya dengan membiarkan mereka makin tersingkir dari dinamika sosial ekonomi.

Keterpinggiran itu terjadi bukan karena mereka secara dasariah tidak mampu, tapi karena dengan perbedaan titik berangkat, perbedaan besaran modal, perbedaan pengetahuan dan ketrampilan tentang ekonomi pasar. Dalam kondisi yang tidak sebanding itu, persaingan yang sebebaskan-bebaskan justru tidak *fair* bagi mereka. Yang mereka butuhkan ialah pendampingan agar bisa secepatnya beradaptasi dan nantinya mampu bersaing secara *fair* dengan para saudaranya dari berbagai wilayah Indonesia lainnya. Dengan kata lain, mereka membutuhkan kepedulian kita. Dimensi etik dalam kebudayaan kita mengajarkan untuk senantiasa peduli pada sesama, dan dalam hal ini perlulah kepedulian sosial itu tercermin dalam kebijakan publik yang formal. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang pro-kaum terpinggir.

Masalahnya, fakta-fakta kasat mata menunjukkan bahwa para pejabat kita seringkali justru hanya menjadikan kaum terpinggir itu sebagai komoditas politik (terutama) menjelang pemilihan umum. Saat menjelang pemilihan Presiden 2009 misalnya, berbagai media, baik cetak maupun elektronik memberitakan dengan gencar ‘kepedulian’ para calon pemimpin negara itu pada kaum marjinal dan perjalanan mereka ke pasar-pasar tradisional kota hingga ke pasar-pasar kampung. Berita sejenis muncul juga menjelang pemilihan gubernur, bupati, atau pun walikota di santero

---

<sup>3</sup>Sebenarnya kondisi ini berlangsung tidak hanya di Papua, tapi juga di berbagai kota di Indonesia.

Nusantara. Namun, fakta membuktikan pula bahwa tidak banyak perbaikan yang terjadi setelah kunjungan-kunjungan seremonial tersebut. Di Kota Jayapura, misalnya, kita bisa melihat banyak mama-mama Papua masih “melantai” di trotoar-trotoar. Kita juga melihat bagaimana kondisi pasar Youtefa yang becek dan penuh sampah. Setelah sekian kali pergantian kepala daerah, sarana dan prasarana pasar masih tetap minim, kebersihannya tetap memprihatinkan, dan kehidupan riil kaum petani serta pedagang komoditas tradisionalnya pun tidak beranjak menjadi lebih baik. Terlebih para pedagang asli Papua. Kenyataan tersebut, kiranya menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah kota terhadap pasar sebagai arena peningkatan ekonomi masyarakat masih sangat minim.

Peristiwa ‘menagih janji’ yang dilakukan oleh mama-mama Papua yang berdagang di lahan parkir pada 13 Oktober 2008 hanyalah satu contoh kecil dari hampa dan absurdnya janji-janji kampanye. Para pedagang itu hanya ‘ada’ dan mendapat perhatian, menjadi objek ‘kepedulian’, saat kaum elit membutuhkan perhatian dan dukungan. Selanjutnya, ketika perhatian dan dukungan itu telah membuahkan kedudukan bagi para penebar janji, maka wacana yang berkembang bisa berubah drastis. Contoh konkrit, dalam demo tersebut salah satu mama dengan lantang mengungkapkan kekesalannya, "Pak walikota, saya tagih janjinya. Saya tak perlu bicara banyak, karena tahun 2003 lalu, saya ingat sekali kata-kata bapak untuk membangun pasar ini." Namun, menanggapi kekesalan warganya itu bapak walikota hanya bisa mengatakan,

“pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tidak memiliki dana dan tempat untuk pembangunan pasar bagi mama-mama. Dana yang ada sudah dialokasikan ke semua pos pembangunan, termasuk pembangunan Pasar di Entrop dan Dok IX. "Mama-mama, tadi saya sudah dengar penjelasan dari pimpinan demo dan perwakilan mama-mama, dalam minggu ini saya tugaskan Bapak Frans Pekey untuk menyiapkan proposal yang akan kami ajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua. Pemerintah Kota Jayapura tidak memiliki aset tanah dan dana yang cukup, jadi kita minta ke Provinsi. Mama-mama, kita juga harus berdoa supaya Tuhan memberkati kita punya perjuangan ini", (...). Mengakhiri penjelasannya, Wali Kota Jayapura, M.R. Kambu meminta Br. Rudolf memimpin doa dan usai berdoa bersama massa bersalaman dengan Bapak Wali Kota.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>[http://dinamika.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/14042009140522\\_PELANGGARAN\\_HAM.docx](http://dinamika.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/14042009140522_PELANGGARAN_HAM.docx).

Dialog pasca kampanye itu menunjukkan pada kita bahwa apa yang sebelumnya terdengar sebagai sesuatu yang ‘pasti terwujud’ saat kampanye, saat sang calon belum memiliki kekuasaan, kembali mentah dan menjadi sekedar ‘harapan kosong’ justru ketika sang pejabat sudah berada pada posisi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Memang ada satu hal yang sangat dilematis apabila tuntutan itu dipenuhi, yaitu lahan yang diminta oleh para mama Papua, yakni gudang bekas milik PD Irian Bhakti di Jalan Percetakan Jayapura, adalah lahan di tengah kota yang sudah sangat padat. Kalau pun lahan yang ditunjuk dalam demo itu dapat dibebaskan, maka perlu dilihat apakah pasar tersebut sungguh sesuai dengan perencanaan tata kota, dan dapat terjamin kelayakannya dalam konteks kebersihan, kenyamanan, dan keindahan kota. Masalahnya, bagaimana pasar tradisional tersebut akan dikelola? Sejauh mana pemerintah daerah, dinas terkait, para mama Papua sendiri atau pun LSM yang mengadvokasi mereka, memikirkan bagaimana mengelola dan merawat pasar tersebut agar selalu bersih, indah, dan nyaman? Pengalaman membuktikan bahwa pasar-pasar tradisional selalu menyisakan banyak limbah, sampah, dengan bau yang menyengat dan pemandangan yang sangat mengganggu. Pasar bersih di kota-kota besar umumnya bukanlah pasar berskala besar yang -semata-mata- dikelola secara tradisional. Ada pengelola yang bekerja secara profesional, sehingga keberadaan pasar tersebut bisa selaras dengan standar kebersihan dan kenyamanan kota.

### **Perebutan Ruang, Pertarungan Kepentingan**

Lapangan parkir sewajarnya adalah lahan tempat memarkir kendaraan, namun karena desakan kepentingan ekonomi sejumlah orang, ternyata pemaknaan itu harus berubah (atau secara paksa diubah) menjadi ruang transaksi ekonomi dan ruang ekspresi dinamika kehidupan sosial. Apa yang terjadi di lahan parkir depan Gelael, di tengah kota Jayapura menunjukkan adanya rasa terpuruk dan termarginalkan di satu pihak, dan upaya untuk memperoleh pengakuan akan eksistensi kesukubangsaan di lain pihak. Perebutan kekuasaan atas lahan parkir dan pengalihfungsian sebagai pasar (walau hanya paruh waktu) itu menunjukkan bahwa pemerintah kota belum mampu mengambil langkah-langkah pelayanan yang sungguh memperhitungkan keseimbangan antara dinamika ideal pembangunan kota dengan realitas perkembangan masyarakat. Masyarakat masih dilihat sebagai sebuah struktur yang homogen. Masyarakat masih dilihat dalam sebuah definisi yang tunggal, sehingga pembangunan kota pun hanya terarah pada terpenuhinya kebutuhan mereka yang termasuk dalam definisi tersebut.



Padahal gerak perubahan masyarakat Papua yang amat dinamis itu menghadapkan kita pada kenyataan bahwa masyarakat kota tak dapat didefinisikan secara monolitik.

Mengapa perebutan ruang itu bisa terjadi? Para pedagang senantiasa bergerak dinamis mencari pembeli, antara lain dengan menggelar dagangannya di lokasi yang strategis. Biasanya, para pedagang apapun, entah sayur-mayur, pakaian, makanan, alas kaki, mainan atau pernak-pernik lainnya, akan mencari kawasan-kawasan yang ramai. Situasi ramai di lahan parkir depan Gelael itu tentu tak lepas dari kenyataan bahwa di sekitar tempat tersebut berderet pertokoan yang berhias lampu yang terang dan berwarna-warni, serta aneka musik yang menggugah. Selain itu, tak jauh dari lahan parkir tersebut pun berderet warung-warung kakilima yang menjadi objek kunjungan menarik banyak orang. Di ruang publik seperti itulah orang memenuhi berbagai kebutuhan mereka, entah untuk makan, berbelanja, menonton, berjalan-jalan, atau sekedar menikmati keleluasaan berinteraksi dengan teman. Keramaian, dengan aneka macam sajian, di tempat-tempat yang strategis, mudah dijangkau, tentu akan menarik minat berbagai kalangan untuk hadir dan mengambil bagian dalam keramaian tersebut. Di tempat seperti itulah interaksi berbagai kepentingan berlangsung sangat dinamis. Tempat-tempat seperti itulah yang selalu diincar oleh para pedagang, termasuk pedagang kebutuhan dapur seperti mama-mama Papua maupun para pendatang yang berjualan baju, sandal, sepatu, dan sebagainya.

Di ruang publik seperti itu kebutuhan untuk melakukan interaksi sosial, ekonomi, dan mengembangkan relasi pertemanan atau keluarga, bahkan kebutuhan untuk sekedar 'cuci mata' melepaskan kepenatan dapat terpenuhi. Keramaian malam merupakan ruang di mana orang dapat hanyut dalam kerumunan massa tanpa memikul banyak beban atribut dan peran-peran fungsional yang sepanjang siang membebani mereka di sekolah, kampus, perusahaan, kantor, dan sebagainya. Mereka bisa duduk berlama-lama di taman, di depan toko, pinggir trotoar, tanpa rasa sungkan. Di sana mereka bisa bercerita dan tertawa sebebasnya tanpa batasan 'tatakrama' volume suara sebagaimana halnya di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat formal lainnya. Inilah keasyikan rakyat yang tercipta dengan termanfaatkannya lahan parkir dan trotoar menjadi pasar tradisional dan kakilima. Masalahnya, keasyikan sebagian warga kota itu telah menggeser kenyamanan dan kepentingan para penikmat jalan-jalan (pejalan kaki) dan pengguna kendaraan. Kota menjadi *semrawut*, tak teratur.





Uniknya, sebagian pejalan kaki maupun pengendara yang pada waktu tertentu merasa terganggu itu adalah juga orang-orang yang pada kesempatan lain akan berposisi sebagai konsumen di pasar dan warung-warung kakilima tersebut. Kebanyakan orang tentu enggan berjalan jauh untuk sekedar membeli seikat sayur, makan bakso, atau mengisi pulsa, misalnya. Itu berarti di satu saat mungkin mereka merasa terganggu, tapi di saat lain mereka justru menjadi pengganggu ketertiban. Di satu saat mereka mengeluhkan *kesemrawutan*, tapi di saat lain toh mereka juga membutuhkan keberadaan para ‘penggusur lahan parkir’ dan ‘pengganggu pejalan kaki’ itu, dan pada momen tersebut mereka menjadi pihak yang turut andil dalam *kesemrawutan* itu. Jadi, dalam hal ini pertarungan kepentingan juga terjadi dalam diri masing-masing individu tersebut, antara kebutuhan akan kenyamanan ketika menjadi pejalan kaki dan kepraktisan saat ada kebutuhan akan pulsa, kebutuhan dapur, bersantai sambil makan di warung atau sekedar berinteraksi sosial. Yang terjadi kemudian, jalan damai pun dicapai dengan menolerir keberadaan ‘para penghalang jalan dan penyerobot lahan parkir’ ini. Namun, kiranya ‘jalan damai’ ini sesungguhnya tidak mengantarkan pada kedamaian yang otentik. Jalan damai tersebut hanyalah ungkapan ketidakberdayaan kaum terpinggir ketika mereka tidak mampu memperoleh alternatif lain yang lebih baik.

Fenomena pasar tradisional dan kakilima di pusat kota ini memperlihatkan kepada kita, manakala pemerintah daerah dengan segala kewenangannya tidak mampu menengahi pertarungan kepentingan yang bermuara pada perebutan ruang tertentu dengan menyediakan lahan dan fasilitas yang memadai, serta tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, maka secara spontan masyarakat menata relasi-relasi yang di satu pihak bersifat konfliktif namun di lain pihak bersifat simbiosis-mutualisma itu dengan caranya sendiri.

Fenomena hadirnya ‘para penghalang jalan dan penyerobot lahan parkir’ ini kiranya juga menjadi cermin ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberi ruang usaha yang layak bagi rakyat bawah. Orientasi pada besaran pajak, yang berarti pemasukan daerah, membuat ruang kota seolah hanya didesain bagi para pemodal besar dan kalangan menengah ke atas. Prinsip subsidiaritas dalam bentuk penyediaan ruang bagi pemodal kecil dan masyarakat bawah terabaikan. Akibatnya, kaum terpinggir ini mengaktualisasikan eksistensinya dan *struggle for life*-nya dengan menduduki ruang-ruang yang dianggapnya ‘tak bertuan’. Inilah rasionalitas yang terwujud di lahan parkir dan trotoar kota yang mereka sulap menjadi pasar dan kakilima.





Keberadaan pasar dan pedagang kakilima di area parkir dan trotoar memang tidak semata-mata berdampak buruk. Adanya pasar dan kakilima mengimplikasikan keramaian, menjadikan kota lebih hidup. Situasi seperti itu di satu sisi bisa menghadirkan kepraktisan dan memberi rasa aman. Bandingkan saja dengan bila kita harus ke pasar yang jauh dari jangkauan melalui jalan yang gelap dan lengang di malam hari. Berjalan dalam suasana demikian akan memunculkan rasa was-was, karena rawan tindak kejahatan. Adanya pedagang kakilima di trotoar-trotoar jalan, justru secara langsung menghadirkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan secara kultural menghadirkan relasi sosial dalam suasana informal yang akrab.

Adianto (2009), dalam penelitiannya tentang pedagang kakilima di pasar sekitar Kebun Raya Bogor juga menemukan bahwa

“... masyarakat relatif enggan melakukan kegiatan pertukaran pada lokasi-lokasi yang sulit ditempuh atau jauh jarak tempuhnya. Hal inilah yang menyebabkan trotoar menjadi ruang pertukaran karena terjadi pertemuan antara pedagang kakilima dan pembeli. Ruang pertukaran menjadi sangat efisien dan efektif karena dapat berlangsung dengan cepat dan mudah dengan harga yang terjangkau.”

Perebutan hak atas ruang antara pedagang pasar dan pengguna parkir, atau pun antara pedagang kakilima dan pejalan kaki pada gilirannya menciptakan lingkup perebutan ruang yang lain, antara hak pengguna jalan dan kebutuhan akan tempat parkir. Kehadiran pasar dan pedagang kakilima tentunya mengundang orang untuk mampir ke situ. Sebagian di antaranya berkendara, entah sepeda motor atau pun mobil. Tiadanya ruang yang cukup untuk parkir, karena lahan parkirnya sudah digunakan untuk berjalan, membuat mereka -mau tidak mau- memarkir kendaraannya di badan jalan. Akses bagi pengguna jalan pun semakin sempit, karena lebar jalan berkurang. Di sejumlah tempat, para pejalan kaki pun terpaksa berjalan di badan jalan, karena trotoar yang merupakan ruang bagi mereka sudah dirampas oleh para pedagang kakilima. Dinamika ini membuat ruang publik yang idealnya menjadi ruang interaksi yang nyaman berubah menjadi ruang perlawanan, ruang pertarungan kepentingan, ruang konflik (bdk. Adianto, 2009). Perubahan fungsi yang berdampak pada perubahan pemaknaan ini membuat lahan parkir dan trotoar sebagai sarana pengikat hubungan emosional antara masyarakat dengan kotanya (antara lain dengan berjalan-jalan menikmati suasana kota) terganggu. Masyarakat tidak bisa sepenuhnya menikmati suasana nyaman karena sebagian haknya dirampas oleh pihak lain.





Bagi sebagian warga, lahan parkir dan trotoar kota sebagai ruang publik dengan aneka kegiatan yang terbentuk di sana merupakan ruang perjumpaan dan pertukaran yang efisien dan efektif, baik secara sosial maupun ekonomi. Kenyataan bertambahnya kegiatan di lahan parkir dan trotoar (atau teralihnya fungsi trotoar dan lahan parkir) semestinya membuka mata para pengambil kebijakan untuk merancang tata kota, agar dapat mengakomodasi kebutuhan interaksi sosial maupun ekonomi masyarakat, yakni kebutuhan akan ruang-ruang publik yang produktif. Konkritnya, masyarakat butuh lahan parkir dan trotoar, tapi sekaligus juga membutuhkan taman kota, pasar tradisional, maupun kakilima yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan harian mereka, maka sepantasnyalah ada ruang khusus bagi mereka agar tidak merampas hak pemilik kendaraan maupun para pejalan kaki.

### **Menata Ruang Publik: Menata Budaya**

Trotoar dan lahan parkir sebagai bagian dari ruang publik kota secara riil telah menjadi ruang perjumpaan dan pertukaran sosial yang efektif maupun ekonomi yang efisien. Kenyataan tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat kota membutuhkan kombinasi yang seimbang antara lahan parkir yang luas, trotoar yang tertata baik dan nyaman untuk berjalan kaki atau duduk beristirahat menikmati keindahan kota, sekaligus ruang kakilima yang memadai untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk ruang nyaman untuk berjualan bagi mama-mama penjual kebutuhan dapur. Bila kita mengakui keberadaan para pedagang kecil sebagai warga masyarakat yang berperan besar dalam dinamika kehidupan kota, maka sepantasnyalah ada ruang khusus bagi para pedagang kecil itu agar tidak merampas hak para pejalan kaki atau pun pengguna lahan parkir, sekaligus tak menodai keteraturan kota. Penataan trotoar dan lahan parkir dengan menyediakan ruang yang strategis dan layak bagi pedagang kakilima kiranya merupakan bagian penting dari tata ruang kota.

Masyarakat kota membutuhkan pedagang kakilima yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan harian mereka. Dari sudut pandang budaya, kakilima merupakan tempat nilai egaliter lebih terasa, ruang di mana interaksi antarindividu terasa setara, walaupun kenyataannya berbagai kelas sosial bertemu di sana. Di kakilima, berjumpalah orang dari berbagai tempat, baik yang datang dengan berjalan kaki, mengendarai sepeda, sepeda motor, menumpang kendaraan umum maupun mengendarai mobil pribadi. Bila kita cermati, simbol kesetaraan sosial itu dapat dilihat pada busana yang dominan dan khas di kakilima, seperti *T-shirt* dan celana *jeans*, sandal jepit





atau pun sepatu kanvas/kets, hingga jaket-jaket model *juniper* yang sedang *ngetren* di kalangan anak muda. Di warung-warung kakilima, para tamu duduk berjajar di bangku panjang yang sama menghadap meja yang dipakai bersama, dan menikmati menu dengan harga yang kurang-lebih setara. Kakilima adalah ruang kesetaraan dan kebersamaan bagi sesama warga, walau kenyataannya mereka mungkin berasal dari kelas sosial yang berbeda.

Suasana seperti ini tentu berbeda dengan yang kita jumpai di restoran atau kafe -misalnya- di mana satu-dua orang, atau sekelompok orang secara eksklusif ‘menguasai’ satu meja, dan antara satu meja dengan meja yang lain tersaji menu yang bisa sangat berbeda corak dan harganya. Di meja-meja restoran dan kafe seperti itu tampaknya perbedaan kelas sosial di antara pengunjung. Berbeda dengan restoran, kafe dan *mall*, kakilima adalah ruang kerakyatan, ruang perjumpaan warga masyarakat. Bila ruang itu memadai bagi interaksi yang konstruktif maka relasi yang tercipta pun adalah relasi dialogis. Sebaliknya, bila ruang publik semacam itu *amburadul*, maka relasi yang tercipta adalah benturan antara berbagai pihak dan kepentingan.

Dinamika kehidupan masyarakat kota menuntut penataan ruang publik yang mampu mengakomodasi berbagai macam kebutuhan, baik di ranah interaksi sosial, transaksi ekonomi, rekreasi, bahkan ranah diskusi intelektual yang produktif. Dalam keseluruhan itu bertumbuhkembang pula kebudayaan. Bukankah di berbagai tempat “warung kopi” pinggir jalan seringkali menjadi tempat nyaman bagi sesama warga untuk saling mencurahkan berbagai kekesalan terhadap dinamika hidup, kondisi sosial politik dan sebagainya?

Masyarakat kota membutuhkan ruang untuk melepaskan diri dari kepenatan rutinitas kota dan berbagai bentuk polusinya; entah polusi udara, polusi suara, polusi visual, dan sebagainya. Secara keseluruhan, ruang publik semacam itu bukanlah sekedar ruang yang dikonstruksikan berdasarkan visualitas fisiknya. Ruang publik yang memadai pada gilirannya akan bermakna sebagai ruang kultural, di mana kebudayaan menemukan lahannya untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kami maksud dengan kebudayaan dalam hal ini bukanlah dalam konsep estetis dan elitis sebagai ‘seni-tinggi’ yang adiluhung, melainkan kebudayaan sebagai ‘keseluruhan cara hidup’ (Barker, 2008: 39). Kebudayaan ialah dinamika interaksi antarmanusia. Dalam proses itulah mereka menemukan dirinya lebih bernilai, pengalaman-pengalamannya lebih bermakna, dan hidupnya terasa lebih manusiawi. Kebudayaan adalah jejaring makna yang dipahami bersama oleh sekelompok orang yang hidup bersama (Geertz, 1992: 5).

Dalam merancang ruang fisik, kiranya sangat penting untuk mengakomodir pengalaman-pengalaman pengguna ruang itu sendiri dan mengidentifikasi kemungkinan kebutuhan dan aktivitas yang akan muncul di dalamnya. Ruang publik harus dikonstruksi untuk sekaligus juga menjadi ruang kebudayaan: ruang pemanusiawian kehidupan. Maka, selain kakilima yang memadai, hal yang tak kalah penting, masyarakat kota juga sangat membutuhkan ruang-ruang di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, antara lain dalam bentuk:

- Taman hiburan dengan panggung pertunjukan yang terbuka untuk umum, di mana berbagai kalangan bisa berkreasi dan berekreasi. Di ruang seperti itu warga bisa menunjukkan hasil kreativitasnya.
- Ruang terbuka hijau tempat mereka bisa beristirahat dan menghirup udara segar, entah dalam bentuk taman kota atau pun hutan lindung yang dapat berfungsi sebagai hutan wisata.

Penataan ruang publik kota akan berpengaruh pada dinamika masyarakatnya. Jika tidak ditata dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi munculnya konflik ruang sekaligus menjadi ruang konflik. Konflik masyarakat perkotaan di negeri kita umumnya terjadi karena adanya persilangan antara upaya penataan oleh pemerintah yang kurang peka akan realitas beban hidup warga dan pemberontakan masa-rakyat yang merasa tertindas dan termarginalkan. Secara khusus, persilangan kepentingan tersebut terjadi karena adanya benturan kepentingan ekonomi, dan mereka yang lemah secara ekonomi seringkali menjadi pihak yang terabaikan.

Munculnya aktivitas sosial dan ekonomi di trotoar menimbulkan konflik ruang, karena tidak ada lagi keselarasan antara 'ruang yang tersedia' dan 'ruang yang dibutuhkan'. Tanpa penataan yang memadai, yang sangat mungkin terjadi adalah pertarungan antarwarga dalam memperebutkan ruang publik, yang berimbas pada menurunnya kualitas lingkungan dan merosotnya kualitas relasi sosial. Ini berarti pula menurunnya tingkat kenyamanan hidup.

### **Kesimpulan**

Upaya mama-mama pedagang asli Papua untuk memperoleh pasar yang layak di tengah kota Jayapura telah dilakukan sejak tahun 2004. Upaya panjang tak kenal lelah itu menunjukkan pada kita betapa besar tekad mereka untuk maju, berkiprah dalam perputaran roda perekonomian keluarga. Kaum ibu tampaknya tidak lagi puas sekedar bergelut di ranah domestik, di antara rumah, kandang, dan kebun. Mereka pun ingin



membuktikan diri sebagai orang-orang yang mampu berkontribusi konkrit dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Walau demikian, mereka juga menyadari betapa kerasnya persaingan pasar bebas, dan mereka membutuhkan sedikit proteksi dari pemerintah daerah. Lebih dari itu, mama-mama asli Papua sangat membutuhkan dukungan serta pendampingan yang memberdayakan agar lebih mampu mengambil bagian dalam dunia perdagangan modern yang penuh nuansa persaingan.

Di lain pihak, dinamika kehidupan masyarakat kota menuntut penataan ruang yang mampu mengakomodasi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan untuk melakukan transaksi ekonomis, interaksi sosial, transportasi, atau pun rekreasi. Dalam seluruh dimensi itulah kebudayaan bertumbuh dan berkembang. Jika ruang kota tidak ditata dengan baik, hal ini dapat memicu munculnya konflik. Konflik ruang dalam masyarakat perkotaan di negeri kita umumnya terjadi karena adanya benturan antara kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang-ruang yang potensial untuk melakukan transaksi ekonomi dan upaya penataan kota oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah seringkali tampak kurang peka dan kurang mampu mengantisipasi kebutuhan ruang transaksi ekonomi tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat pun mengungkapkan pemberontakannya dengan menduduki ruang-ruang publik, merampas kepentingan warga masyarakat lainnya.

Secara umum perebutan ruang publik tersebut terjadi karena adanya gesekan ataupun benturan akibat persilangan berbagai macam kepentingan. Munculnya aktivitas sosial dan ekonomis di tengah kota bisa menimbulkan konflik ruang, karena tidak ada keselarasan antara ruang yang tersedia dan cepatnya perubahan yang terjadi di dalamnya. Tanpa perencanaan yang berwawasan jauh ke depan dan penataan yang memperhatikan kondisi riil saat ini, yang terjadi adalah pertarungan antarmasyarakat dalam memperebutkan ruang. Imbasnya tak lain ialah menurunnya kualitas lingkungan, yang berarti pula menurunnya tingkat kenyamanan hidup.

Persoalan para mama Papua di Kota Jayapura kiranya mengantar kita pada pemahaman bahwa sebagai warga kota mereka membutuhkan kepedulian kita. Keberadaan mereka harus termasuk dalam perhitungan aparat pemerintahan dalam merencanakan tata kota. Di lain pihak, kenyataannya warga kota juga membutuhkan pasar tradisional yang berada dalam jangkauan ketika mereka tengah melakukan aktivitas lainnya. Masyarakat kota membutuhkan tempat berbelanja keperluan dapur yang dapat mereka jangkau sambil berjalan-jalan atau santai menikmati keindahan kota. Konsep *one stop shopping* sebagaimana terwujud pada pusat-pusat



perbelanjaan, kiranya perlu ditransformasikan ke dalam jangkauan para pelaku ekonomi kecil dan tradisional.

Dalam merancang ruang fisik, sangat penting untuk mengakomodasi pengalaman-pengalaman pengguna ruang tersebut dan mengidentifikasi kemungkinan kebutuhan dan aktivitas yang mungkin akan muncul di dalamnya. Masyarakat kota membutuhkan ruang publik yang representatif; ruang di mana mereka bisa mengekspresikan hasil kreativitasnya sekaligus ruang di mana mereka bisa “duduk bicara”, mengaktualisasikan diri dalam relasi sosial yang akrab dengan kerabat dan para sahabat. Oleh karena itu, tata ruang kota harus dikonstruksi untuk berbagai kepentingan, baik sosial, ekonomi, sekaligus ruang bagi pengembangan budaya.



### Daftar Pustaka

- Adianto, ST, M. Ars., Joko dan Meydian Sartika Dewi, ST, M.Ars. *Pasar: Arena Perebutan Ruang Kehidupan Warga Kota*. <http://d-eyeview.com/files/folders/134/download.aspx>. Diunduh pada 03 Juni 2009.
- Barker, Chris. 2008. *Cultural Studies. Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian. Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- De Certeau, Michel. 1984. *The Practice of Everyday Life*. Berkley: University of California Press.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suara Pembaruan. 2008. *Mama-mama Asli Papua Berdemo*. 13 Oktober 2008.
- .... 2008. "Kami Mama-mama Asli Papua Butuh Pasar yang Layak di Tengah Kota", Jayapura, 17 Oktober 2008. [http://dinamika.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/14042009140522\\_PELANGGARAN\\_HAM.docx](http://dinamika.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/14042009140522_PELANGGARAN_HAM.docx). Diunduh pada 11 Juni 2009.
- Van de Broek, Theo. 1998. “Pembangunan, Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya,” dalam Laksono, PM. *Kekayaan, Agama, dan Kekuasaan. Identitas dan Konflik di Indonesia (Timur) Modern*, hal. 33-75. Yogyakarta: Lembaga Studi Realino dan Penerbit Kanisius.

